



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen perencanaan ini disusun sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh jajaran BPSDM Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengembangan SDM aparatur selama tahun anggaran 2026. Renja 2026 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) BPSDM 2025-2029, yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara. Penyusunannya telah melalui proses analisis yang komprehensif, termasuk evaluasi capaian kinerja tahun 2025, identifikasi tantangan, serta memperhitungkan peluang dan dinamika lingkungan strategis ke depan.

Pada tahun 2026 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra, fokus utama kami adalah pada akselerasi dan konsolidasi program-program prioritas. Seluruh program dan kegiatan didesain untuk secara langsung mendukung terwujudnya aparatur Maluku Utara yang profesional, berintegritas, dan kompeten, yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen Renja 2026 ini masih mungkin memiliki kekurangan. Untuk itu, kami membuka diri untuk menerima masukan dan saran konstruktif dari semua pemangku kepentingan guna penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan kami agar dokumen ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan efektif oleh seluruh pihak terkait demi suksesnya pembangunan sumber daya manusia aparatur di Provinsi Maluku Utara.

Sofifi, September 2025

Kepala Badan Pengembangan SDM
Provinsi Maluku Utara



Drs. IDRUS ASSAGAF

NIP. 19660717 199203 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud Dan Tujuan	4
4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BPSDM TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPSDM	14
2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	18
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPSDM Prov. Maluku	21
3.3. Program dan Kegiatan BPSDM Tahun 2026	23
BAB IV : PENUTUP	28
4.1. Kesimpulan	28
4.2. Saran dan Rekomendasi	29

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2025 -2029	13
2. Tabel 2.2.	Sumber Daya Aparatur Pada BPSDM Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan	17
3. Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Prov. Maluku Utara	20

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun untuk Tahun ke Pertama dari Renstra Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai Pedoman Kerja selama periode 1 (Satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategi jangka menengah (RPJMD) Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokrasi. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan Program/Kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

II. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 memiliki landasan hukum yang spesifik, Berikut adalah landasan hukum utama yang menjadi acuan penyusunan Renja BPSDM Provinsi Maluku Utara tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2011 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2015-2019;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor ... Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019;
- l. Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara;

m. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor... tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

3.1. MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman kerja yang operasional dan terukur bagi seluruh jajaran BPSDM dan unit kerja terkait dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun anggaran 2026. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bersama yang memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia, dialokasikan dan dimanfaatkan secara optimal, terarah, sistematis, dan bertanggung jawab untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Secara khusus, Renja 2026 dimaksudkan untuk menjabarkan komitmen strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis BPSDM Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029 ke dalam rencana aksi tahunan yang konkret dan dapat dilaksanakan.

3.2. TUJUAN

Secara lebih rinci, penyusunan Renja Tahun 2026 ini bertujuan untuk:

➤ ***Menjamin Keselarasan dan Kontribusi Langsung terhadap Pembangunan Daerah.***

Renja 2026 disusun untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pada BPSDM Provinsi Maluku Utara selaras dengan dan secara langsung mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, khususnya dalam hal penguatan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia.

➤ ***Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.***

Dokumen ini menjadi dasar untuk pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban kinerja institusi maupun anggaran. Dengan adanya

target indikator kinerja yang jelas dan terukur, Renja 2026 memungkinkan untuk dilakukan penilaian atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di akhir tahun.

➤ ***Mengoptimalkan Alokasi dan Penggunaan Sumber Daya.***

Tujuan utama lainnya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai kebutuhan sumber daya, terutama anggaran, yang diperlukan untuk melaksanakan semua program dan kegiatan pada tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemborosan, mendukung efisiensi, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak kinerja yang maksimal.

➤ ***Sebagai Alat Manajemen untuk Koordinasi dan Sinkronisasi.***

Rencana Kerja tahun 2026 berfungsi sebagai alat manajemen internal untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan (sinkronisasi) seluruh kegiatan antar bidang di lingkup BPSDM Provinsi Maluku Utara, sehingga tercipta sinergi dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan di atas, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 dapat berjalan dengan lebih terencana, efektif, efisien, dan akhirnya berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya aparatur Maluku Utara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.

IV. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD serta tindak lanjut penyusunan RAPBD

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

1.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

1.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Sub Bab ini berisi uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

- dan terhadap capaian program nasional;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

1.4 Reviuw terhadap rancangan Awal RKPD Sub bab ini berisi mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Berisi mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan

misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA BPSDM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan 2025

Pada tahun 2024 Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan 1 (Satu) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Dan 1 (Satu) program yang sifatnya supporting terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah anggaran untuk membiayai program ini sebesar Rp. 2.149.999.680.- (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dan sebelum berakhirnya pelaksanaan anggaran ada terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 3.459.998.680 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan Proporsi realisasi anggaran sebesar Rp. 3.451.888.732.- atau 99.76%. Indikator programnya adalah Persentase ASN yang dikembangkan kompetensi manajerial, Fungsional dan sertifikasi kompetensi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis. Indikator outputnya adalah cakupan pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dengan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99.50%.
- b. Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Indikator outputnya adalah Cakupan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan Proporsi capaian

kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99.81%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Jumlah anggaran untuk membiayai program ini sebesar Rp. 11.794.159.802.- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah) dengan Proporsi realisasi anggaran Rp. 11.538.496.667.- atau 97,83% Indikator programnya adalah Presentase Prangkat Daerah dengan Nilai LKj >80. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target sebesar 100 %.

Kegiatan-kegiatan yang berhasil dilaksanakan adalah:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah cakupan pemenuhan dukungan peningkatan system pelaporan capaian kinerja dengan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 59.78%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah cakupan pemenuhan dukungan peningkatan pengembangan system pelaporan keuangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99.53%.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah cakupan dukungan administrasi BMD pada PD, dengan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 0%.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah cakupan pemenuhan dukungan administrasi kepegawian PD, dengan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 86.17%.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator outputnya cakupan pemenuhan dukungan administrasi umum PD, dengan

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 98,65%.

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator outputnya cakupan pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 97.09%.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator outputnya cakupan Jasa urusab Pemda, dengan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 86.28%.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. outputnya cakupan pemeliharaan BMD penunjang PD, dengan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 99.27%.

Sedangkan untuk tahun 2025 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 17.770.855.904.- yang terdiri dari belanja Operasi dalam APBD sebesar Rp. 15.885.062.804.- dan Belanja Modal Sebesar Rp. 1.885.793.100.-.

Pada pelaksanaan anggaran tahun 2025 terdapat beberapa kali efisiensi sehingga pagu anggaran berubah. Sampai Rencana Kerja ini buat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan III tahun 2025, untuk penganggaran menjadi Rp. 15.566.346.110, dengan realisasi belanja Operasi sebesar Rp 8.929.951.837.- atau (57,37%) dan belanja Modal sebesar Rp. 33.610.000.- atau (1.78%). Untuk belanja modal penyerapan anggaran masih rendah, namun telah dilaksanakan pengadaan untuk belanja modal dan untuk pembayarannya masih dalam proses pada perbendaharaan, sehingga belum tercatat pada LRA Triwulan III. Pagu anggaran ini adalah untuk membiayai pelaksanaan 2 (Dua) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan pada BPSDM Provinsi Maluku Utara.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam implementasi Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029. Pada tahun ini, pencapaian Renstra difokuskan pada realisasi sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk periode tahun kedua, dengan tetap mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan kesinambungan menuju target akhir Renstra 2029

Kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk hasil pelaksanaan rencana kerja yang disusun, dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2026 pada BPSDM Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029
Provinsi Maluku Utara

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)</i>			11,760,413,926	11,538,496,667	98.11			
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	159,791,400		154,662,700	92,461,380	59.78			
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	6,989,836,450		8,308,524,190	8,269,736,870	99.53			
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	32,180,000		15,680,000	-	0.00			
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			45,391,000	39,112,200	86.17			
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1,008,820,460		1,372,720,002	1,354,240,106	98.65			
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	700,119,900		1,071,339,756	1,040,212,600	97.09			
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	439,700,000		335,520,000	289,491,852	86.28			
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1,491,249,400		456,576,278	453,241,659	99.27			
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis								
		2. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional								
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	1,295,000,000		499,999,800	497,499,800	99.50			
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	4,652,722,750		2,959,998,880	2,954,388,932	99.81			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara

Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga teknis Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek yang profesional, mampu menyusun pengembangan Aparatur yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kompetensi Aparatur di Daerah.

Untuk mencapai visi dan misi yang merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, maka Badan Pengembangan SDM melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Badan Pengembangan SDM dengan RKPD Provinsi Maluku Utara menjadi mutlak.

Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian di pertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), Badan Pengembangan SDM sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 1 (Satu) urusan Penunjang yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan Urusan Pemerintahan, bidang Pendidikan dan Pelatihan. Selain itu dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa LAN RI melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. Hal ini berarti

bahwa untuk menyelenggarakan suatu Pelatihan diberikan kewenangan kepada Lembaga Diklat yang terakreditasi. Dalam hal ini Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara dimana Badan Pengembangan SDM sebagai salah satu Lembaga Teknis yang mempunyai tugas membantu Gubernur dibidang pendidikan dan pelatihan.

Dengan Akreditasi yang dimiliki serta kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara dengan didukung kemampuan sumber daya aparatur, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dapat terlaksana baik untuk fasilitasi Kabupaten/Kota maupun Provinsi Maluku Utara.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelatihan aparatur mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya Jumlah penyelenggaraan pelatihan melalui Fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Dasar bagi CPNS(LATSAR) di Kabupaten/Kota ditandai dengan peningkatan kepercayaan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengirimkan peserta pelatihannya ke Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara.
2. Meningkatnya kualitas Koordinasi dalam pelaksanaan Pelatihan
3. Meningkatnya komponen persyaratan untuk memperoleh Akreditasi dalam penyelenggaraan pelatihan.

Namun untuk penyelenggaraan pelatihan di lingkup Pemda Provinsi Maluku Utara sendiri mengalami penurunan yang sangat signifikan. Keadaan ini sangat nampak dengan berkurangnya frekwensi penyelenggaraan pelatihan-pelatihan manajerial dan fungsional seperti Pelatihan Kepemimpinan Adminsitrator (PKA). Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Fungsional. Beberapa indikator yang memperlihatkan

berkurangnya penyelenggaraan pelatihan tersebut meliputi:

- a. Alokasi anggaran dan yang masih kurang untuk pengembangan Sumber Daya aparatur.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan berupa gedung belajar dan asrama tempat tinggal peserta pelatihan.

Dalam perkembangan Badan Pengembangan SDM provinsi Maluku Utara kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas dengan mengedepankan peningkatan kapasitas dan komitmen SDM Kediklatan, memantapkan Penyelenggaraan Pelatihan berbasis Kompetensi serta membangun kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja kunci.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara

[illegible]

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat di implementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu system operasional Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara telah dirumuskan dengan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Badan Pengembangan SDM dirumuskan melalui Renstra Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara yang tidak terlepas dari Kebijakan Gubernur di Bidang Pengembangan SDM Aparatur. Adapun strategi BPSDM Provinsi Maluku Utara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelatihan sesuai kebutuhan dan tantangan penerapan UU ASN.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Aparatur.
3. Menyiapkan dan Menerapkan standarisasi pengembangan SDM Aparatur
4. Memenuhi sarana prasarana pelatihan seseuai standar

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja BPSDM Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 tidak terlepas dari dua dokumen perencanaan, yaitu Hasil Analisis Kebutuhan yang dilakukan dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keduanya berfungsi sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan menguatkan, menjamin bahwa rencana kerja BPSDM bukan hanya responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan, tetapi juga selaras dan terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah.

Jika dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, maka dapat disimpulkan bahwa rancangan awal RKPD tahun 2026 telah memuat program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, namun pada penganggarannya terdapat perubahan di beberapa kegiatan. Dari hasil analisis kebutuhan yang dibuat terdapat masih kurangnya alokasi anggaran untuk membiayai program teknis maupun penunjang pada BPSDM. Pada tahun anggaran 2026 juga masih terdapat pemangkasan pagu anggaran pada tiap OPD, dikarenakan adanya pengurangan TkD dari pemerintah pusat yang mana pada tahun 2025 APBD-P Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 3,5 T berkurang 20,23% atau turun sebesar Rp. 709 M dan menjadi Rp. 2,7 T. Penurunan TkD dari pemerintah pusat ini mempengaruhi penganggaran di masing-masing OPD untuk membiayai program dan kegiatan pada tahun 2026, namun untuk penganggarannya belum diinput pada Aplikasi SIPD.

Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan pada BPSDM Provinsi Maluku Utara dalam penyusunan Renja tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Provinsi Maluku Utara

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sofifi	1. Presentase ASN yang dikembangkan kompetensi teknis dan fungsional	30,50	2,469,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sofifi	1. Presentase ASN yang dikembangkan kompetensi teknis dan fungsional	30,50	3,050,000,000	
			2. Presentase ASN yang dikembangkan kompetensi Manajerial dan sertifikasi kompetensi	30,50				2. Presentase ASN yang dikembangkan kompetensi Manajerial dan sertifikasi kompetensi	30,50		
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Sofifi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Teknis	100	500,000,000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Sofifi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Teknis	100	750,000,000	
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sofifi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kelembagaan	100	1,969,000,000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sofifi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kelembagaan	100	2,300,000,000	
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sofifi	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi yang terlaksana	100	11,515,006,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sofifi	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi yang terlaksana	100	11,679,860,100	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sofifi		100	45,931,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sofifi		100	50,000,000	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sofifi		100	1,165,900,100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sofifi		100	1,165,900,100	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sofifi		100	500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sofifi		100	150,000,000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sofifi		100	300,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sofifi		100	300,500,000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sofifi		100	125,033,400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sofifi		100	130,000,000	
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sofifi		100	9,602,960,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sofifi		100	9,602,960,000	
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sofifi		100	213,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sofifi		100	213,000,000	
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sofifi		100	15,750,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sofifi		100	17,500,000	
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sofifi		100	45,931,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sofifi		100	50,000,000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja- Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan. Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara Selain mengacu pada Ketentuan tersebut diatas, juga dalam menyusun Program dan Kegiatan didasarkan pada Hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) maupun tuntutan kebutuhan pelatihan yang muncul akibat adanya kebijakan baru atau persoalan yang muncul yang penanganannya melalui pelatihan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara Tahun 2026

Secara rinci, penyusunan Renja Tahun 2026 ini bertujuan untuk:

- **Menjamin Keselarasan dan Kontribusi Langsung terhadap Pembangunan Daerah.**

Renja 2026 disusun untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pada BPSDM Provinsi Maluku Utara selaras dengan dan secara langsung mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, khususnya dalam hal penguatan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia.

➤ **Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.**

Dokumen ini menjadi dasar untuk pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban kinerja institusi maupun anggaran. Dengan adanya target indikator kinerja yang jelas dan terukur, Renja 2026 memungkinkan untuk dilakukan penilaian atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di akhir tahun.

➤ **Mengoptimalkan Alokasi dan Penggunaan Sumber Daya.**

Tujuan utama lainnya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai kebutuhan sumber daya, terutama anggaran, yang diperlukan untuk melaksanakan semua program dan kegiatan pada tahun 2026. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemborosan, mendukung efisiensi, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak kinerja yang maksimal.

➤ **Sebagai Alat Manajemen untuk Koordinasi dan Sinkronisasi.**

Rencana Kerja tahun 2026 berfungsi sebagai alat manajemen internal untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan (sinkronisasi) seluruh kegiatan antar bidang di lingkup BPSDM Provinsi Maluku Utara, sehingga tercipta sinergi dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Penetapan Tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tugas dan fungsi serta arah pembangunan, maka sasaran yang akan dicapai pada penyusunan Renja Tahun 2026 yaitu:

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA (ASN).

1. Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dengan penetapan indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidangnya meningkat menjadi 30%.
 - Terlaksananya minimal 10 jenis diklat teknis dan fungsional dengan kepuasan peserta minimal 80%.
2. Meningkatnya kapasitas kepemimpinan aparatur indikator kinerja:
 - Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Aparatur (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) untuk 80 orang Peserta pejabat eselon III dan eselon IV.
 - Terselenggaranya Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNSD sebanyak 307 orang formasi tahun 2025.

3.1. Program dan Kegiatan Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara Tahun 2026

Pada tahun 2026 Badan Pengembangan SDM akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis

Sub. Kegiatan :

- Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan

Pemerintahan Umum;

- Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum;
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2. Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Penegembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional;
- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar;
- Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga;
- Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional;
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyesuaian Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyesuaian Dokumen Perubahan RKA- SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD;

4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pengadaan Mebel;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Secara lengkap Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara beserta Pendanaannya dapat dilihat pada lampiran Renja ini :

BAB IV

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh analisis dan perencanaan yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif dan realistis yang disusun dengan memperhatikan beberapa hal pokok berikut:

1. Renja 2026 secara konsisten menjabarkan dan mengoperasionalkan visi, misi, dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPSDM 2025-2029, dengan penekanan khusus pada tahun kedua sebagai periode akselerasi dan konsolidasi capaian. Dokumen ini telah memastikan adanya keselarasan vertikal yang kuat antara rencana jangka menengah dengan rencana tahunan, serta keselarasan horizontal dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD.
2. Penyusunan Renja 2026 telah dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam terhadap capaian kinerja tahun 2025, termasuk identifikasi faktor pendukung keberhasilan, kendala/hambatan yang menjadi bahan perbaikan untuk perencanaan yang lebih baik.
3. Renja 2026 menetapkan program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus utamanya adalah pada program Pengembangan Kompetensi Aparatur yang didukung oleh alokasi sumber daya yang proporsional dan prakiraan maju yang terencana.
4. Dokumen ini telah mengintegrasikan prinsip-prinsip antisipatif dan adaptif terhadap berbagai tantangan strategis, baik internal seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur, maupun eksternal seperti dinamika kebijakan, melalui sejumlah strategi yang konkret.

Secara keseluruhan, Renja BPSDM Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi lebih sebagai peta jalan operasional yang akan memandu seluruh jajaran BPSDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan

efisien. Keberhasilan implementasinya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap terwujudnya aparatur Maluku Utara yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.

5.2. Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis keseluruhan proses penyusunan dan substansi Renja 2026, berikut disampaikan saran dan rekomendasi strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi dan pencapaian target yang telah ditetapkan:

1. Penguatan Koordinasi Internal
 - Membentuk tim percepatan implementasi Renja 2026 yang melibatkan seluruh bidang secara terintegrasi
 - Menetapkan sistem monitoring triwulanan dengan indikator kinerja yang terukur
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian target dan melakukan penyesuaian strategi apabila diperlukan
2. Dukungan Kebijakan dan Anggaran
 - Memberikan dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam Renja 2026
 - Menyetujui pengadaan dan perbaikan sarana prasarana pendukung kegiatan BPSDM

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan Renja BPSDM Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas SDM aparatur di daerah.

Sofifi, September 2025

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM
PROVINSI MALUKU UTARA**

Drs. IDRUS ASSAGAF

NIP. 19660717 199203 1 016

LAMPIRAN

RENCANA KERJA
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2026

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						13.938.075.000,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.469.000.000,00							0,00	
	-	-						2.469.000.000,00							0,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	2.469.000.000,00						-	0,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	500.000.000,00			-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				80 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	1.969.000.000,00			-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				30 Orang	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				250 Orang	1.469.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	NON URUSAN						11.469.075.000,00							0,00	
	-	-						11.469.075.000,00							0,00	
1.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	11.469.075.000,00						-	0,00	
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	45.931.000,00			-	1. Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.165.900.100,00			-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	14.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				0 Paket	100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				0 Paket	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				0 Dokumen	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	500,00			-	1. Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				0 Unit	100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				0 Paket	100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	300.500.000,00			-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	85.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	125.033.400,00			-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	33.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.602.960.000,00			-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	9.500.000.000,00	Kota Tidore Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	102.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	1. Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	213.000.000,00			-	1. Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	90.000.000,00	Kota Tidore Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen Dokumen	85.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	15.750.000,00			-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	15.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	45.931.000,00			-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-	-	0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	45.931.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggula ngan kemiskinan	-		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	J U M L A H							13.938.075.000,00							0,00		



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. RAYA 40 Guraping Kec. Oba Utara
S O F I F I

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR : 900.1.3.10/ 344.2 /BPSDM/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2026
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk kelancaran administrasi pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dilingkungan Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan nama-nama tim penyusun.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55887) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, Yang lampirannya Telah dirubah dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthairan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

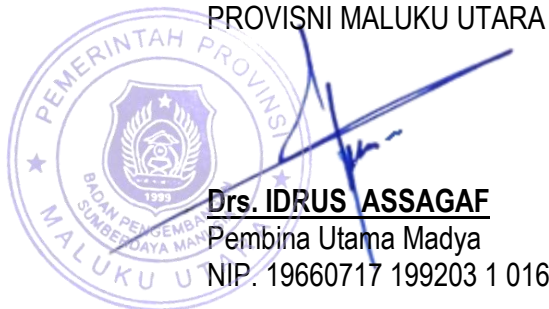
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan nama Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) 2026 pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Maluku Utara sebagaimana terlampir ;
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja tersebut dengan tugas mencakup sebagai berikut :
- a. Menyiapkan dokumen Pendukung pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja 2026 dan;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 8 September 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANG SDM
PROVINSI MALUKU UTARA



Drs. IDRUS ASSAGAF
Pembina Utama Madya
NIP. 19660717 199203 1 016

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan : 900.1.3.10/ ~~341.2~~ /BPSDM/2025

Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026

Tanggal : 8 September 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Idrus Assagaf	Penanggungjawab
2	Syam Sofyan, S.Sos	Ketua
3	Makmur Muntaha, S.Sos	Sekretaris
4	Muhammad Yamin Gaus, S.IP	Angota
5	Anita Eka Putri, S.STP	Anggota
6	Fauziah Djafar	Anggota
7	Evagina Arief, S.Psi	Anggota
8	Suriyati Baba, S.Sos	Anggota

KEPALA BADAN PENGEMBANGAM SDM
PROVISNI MALUKU UTARA



Drs. IDRUS ASSAGAF

Pembina Utama Madya

NIP. 19660717 199203 1 016